

KAJIAN KEMARITIMAN

(Pertemuan 1-2)

MORAWALI

Deskripsi Matakuliah

Mata kuliah ini mengkaji tentang peran penting kemaritiman dalam kontribusi pembangunan Negara Indonesia melaui mengembalikan laut sebagai agenda pembangunan yang berkesinambungan , membangun karakter berbudaya maritim melalui pendidikan, membahas batas laut, diplomasi menggunakan pendekatan data teritorial dan geospasial, menggali kearifan lokal tentang maritim dan kelautan. Melalui kajian kemaritiman ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya keamanan nasional yang dapat menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan keperibadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

Capaian Pembelajaran Matakuliah/Kompetensi

1. mampu menggunakan teknologi inforamsi dan komunikasi untuk menguasai konsep dasar kemaritiman Indoensia
2. mampu memahami konsep-konsep masyarakat dan budaya maritim dan pendekatan-pendekatan teoritik dalam studi fenomena sosial budaya masyarakat maritim.
3. membekali mahasiswa untuk mengerti tentang aspek kemaritiman dan aspek-aspek berkaitan dengannya meliputi sejarah, nilai ekonomi, sosial budaya maritim, pertahanan dan keamanan, sumberdaya hayati, sain dan teknologi maritim, ancaman dan pencemaran, bencana dan mitigasi.
4. bertanggungjawab penguasaan wawasan kemaritiman untuk memperkokok kompetensi Pendidikan IPS

TUJUAN PERKULIAHAN

MAMPU MENGANALISIS RUANG LINGKUP KAJIAN KEMARITIMAN

MAMPU MENJELASKAN SEJARAH KEMARITIMAN

Maritim berasal dari bahasa inggris yaitu *maritime*, yang berarti navigasi, dari kata ini kemudian lahirlah istilah *maritime power* yaitu negara dengan kekuatan maritim atau negara dengan kekuatan yang bebasis di laut. Masih dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat atau kualitas yang menyatakan penguasaan terhadap laut adalah *seapower*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan laut, terutama hal yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut.

maritim dalam pengertian sempit yang hanya berhubungan dengan pengaruh dan laut (angkatan laut) atau maritim dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi semua kegiatan yang berhubungan dan berkenaan dengan laut atau lebih sering disinggung dengan istilah kelautan.

kata kelautan mungkin lebih cenderung mengartikan laut sebagai wadah, yaitu sebagai hamparan air asin yang sangat luas dan menutupi permukaan bumi, yang hanya melihat laut secara fisik dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Indonesia adalah negara yang harus memanfaatkan potensi lautnya, rasanya penggunaan kata maritim akan lebih tepat. Indonesia harus menjadi negara maritim, bukan hanya negara kelautan. Argumentasinya adalah, negara maritim adalah negara yang mempunyai sifat memanfaatkan potensi laut untuk kemakmuran negaranya, sedangkan negara kelautan lebih menunjukkan kondisi fisiknya saja, yaitu negara yang berhubungan, dekat dengan atau terdiri dari laut.


0°
30° E
60° E
90° E
120° E
150° E
180°
150° W
120° W
90° W
60° W
30° W
ARCTIC OCEAN
Greenland
Greenland Sea
Barents Sea
Beaufort Sea
Greenland Sea
North Sea
60° N
ASIA
Bering Sea
EUROPE
Sea of Japan
NORTH PACIFIC OCEAN
NORTH AMERICA
NORTH ATLANTIC OCEAN
Andaman Sea
Yellow Sea
Gulf of Mexico
30° N
Red Sea
Mediterranean Sea
AFRICA
Arabian Sea
Caribbean Sea
Equator
Java Sea
Coral Sea
SOUTH AMERICA
INDIAN OCEAN
AUSTRALIA
SOUTH PACIFIC OCEAN
SOUTH ATLANTIC OCEAN
30° S
60° S
ANTARCTICA

Deklarasi Djuanda pada tahun 1957,
menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, laut di antara dan laut di dalam Kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi tersebut menegaskan: (1)
Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri; (2) Bahwa sejak dahulu kala, kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan.

Deklarasi Djuanda (1957) akhirnya diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS-United Nations Convention on the Law of the Sea) ke-3 tahun 1982. Melalui Konvensi Hukum Laut, Indonesia berhasil menambah luas yuriskdiksi wilayah laut menjadi sekitar 5,8 juta km2, termasuk Zona Ekonomi Ekslusif. Luas laut yang mencapai 70 % dari luas wilayah nasional ini meliputi panjang pantai sekitar 95.181 Km dan jumlah pulau 17.504 (DEKIN 2009).

“Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samodera dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga “*Jalesveva Jayamahe*”, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa Kembali”

PIDATO PELAKTIKAN PRESIDEN RI: JOKO WIDODO
JAKARTA, 20 OKTOBER 2014

“… usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut Kembali. Ya… bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, BUKAN! Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samodera”

PIDATO IR. SOEKARNO….
PERESMIAN INSTITUT ANGKATAN LAUT, 1953


EROPA
ASIA
SAMUDRA
PASIFIK
AMERIKA
AFRIKA
SAMUDRA
HINDIA

KEMARITIMAN INDONESIA (1)

- KERAJAAN SRIWIJAYA
- KERAJAAN MAJAPAHIT
- KERAJAAN DEMAK

CENTRE OF EXCELLENCE

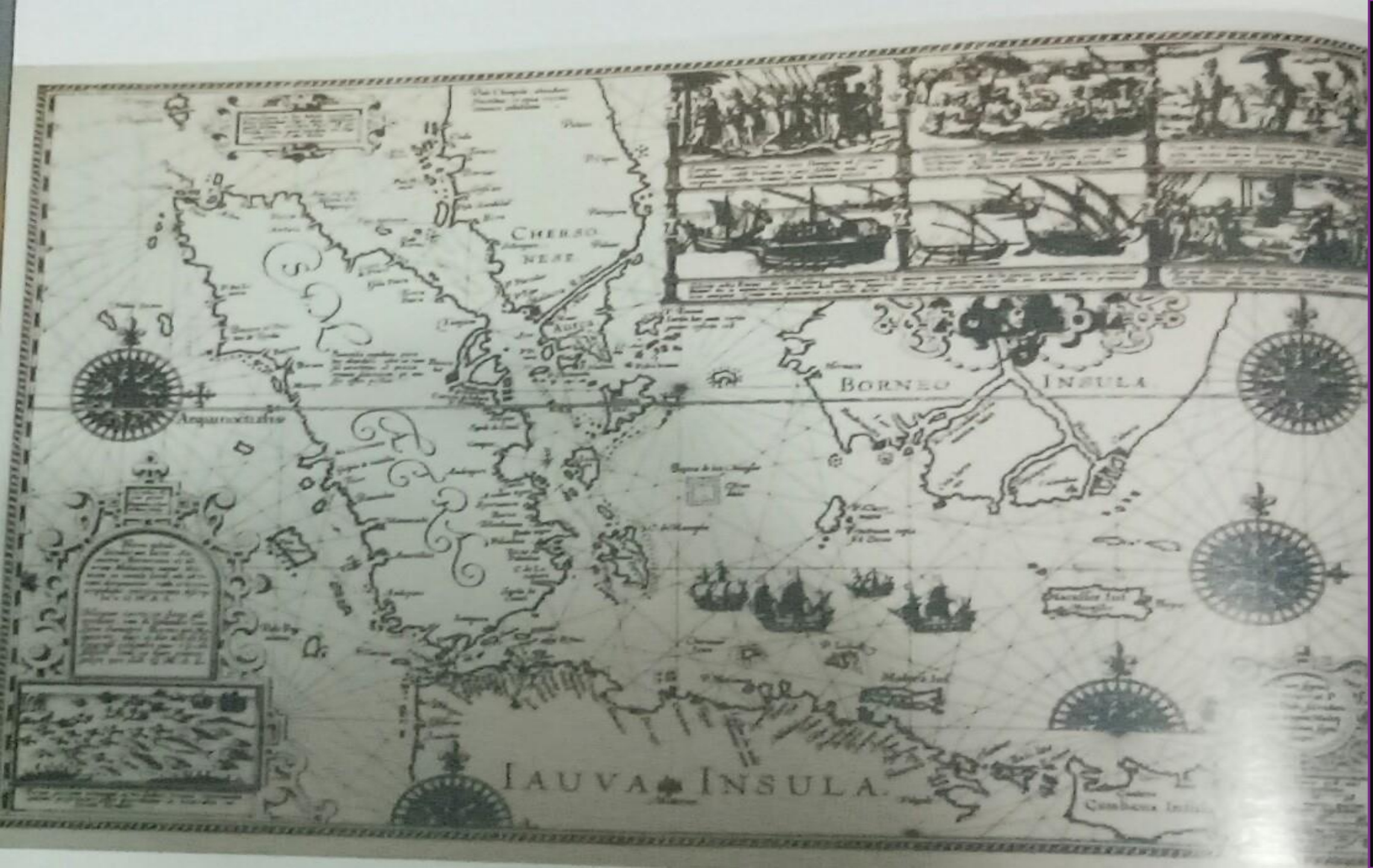
ARMADA NIAGA LAUT
ARMADA MILITER

BIDANG KEMARITIMAN
BIDANG KEBUDAYAAN
BIDANG AGAMA

ASIA TENGGARA



ERA KOLONIAL ABAD 16



ERA KOLONIAL ABAD 16

SEJARAH HARI MARITIM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN



Deklarasi Djuanda

- **1957**

Deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.



- **1964**

Melalui Musyawarah Nasional (Munas) Maritim I Surat Keputusan No. 249 Tahun 1964, berisi penetapan 23 September menjadi Hari Maritim Nasional oleh Presiden Soekarno

Hari Maritim Nasional!
23 September 2017

www.maritim.go.id @kemaritiman @kemenkomaritim Kemenko Bidang Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

ERA KEMERDEKAAN RI



Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibuat oleh BIG



PERUBAHAN KEWILAYAHAN NKRI

Konsep kewilayahan maritim nusantara diawali sebelum negeri ini merdeka. Tahun 1939 pemerintah kolonial Belanda menerbitkan undang-undang yang mengatur hukum laut *'Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie'* yang mengatur bahwa laut teritorial hindia belanda diukur 3 mil dari garis surut pulau, batasan ini masih berlaku saat Indonesia merdeka. Dengan aturan tersebut, pulau-pulau di nusantara seolah dibatasi oleh perairan internasional. Konsep kewilayahan nusantara yang utuh baru dimulai saat pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957.

Dalam menjembatani hak lintas damai dalam wilayah nusantara, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. ALKI terdiri dari tiga alur kepulauan yang melintasi kepulauan Indonesia yaitu ALKI I, ALKI II dan ALKI III



Djuanda Kartawidjaja
Perdana Menteri Indonesia ke-10 adalah pencetus Deklarasi Djuanda yang mengumumkan kepada dunia bahwa laut Indonesia, selain termasuk laut sekitar, di antara dan [illegible] kepulauan Indonesia menjadi [illegible] wilayah NKRI

2015

Jumlah Provinsi: 34
Jumlah Kabupaten/kota: 508
Jumlah pulau yang bernama: 13.466 pulau
Panjang garis pantai: 99.093 km
Luas wilayah daratan: 1.890.754 km²
Luas perairan kepulauan: 3.092.034 km²
Luas laut teritorial: 282.523 km²
Luas landas kontinen: 2.749.691 km²
Luas zona ekonomi eksklusif: 2.936.241 km²

TIME LINE

1 1945
Batas laut teritorial 3 mil dari surut pulau - Territoriale Zee en Maritieme Kringen-Ordonnantie (TZMKO) 1939

2 1957
Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957
Darat dan laut menjadi satu kesatuan tanah air Indonesia

1960
UU No. 4/Prp Tahun 1960
Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut sebesar 12 mil laut

3 1973
UU No. 1 Tahun 1973
Landas Kontinen Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih hingga masih dimungkinkan eksplorasi dan eksploitasi

1983
UU No. 5 Tahun 1983
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia adalah jalur di luar laut wilayah Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal Indonesia

4 1985
UU No 17 Tahun 1985
Mengesahkan United Nations Convention the Law of the Sea (UNCLOS)
Indonesia sebagai negara kepulauan

1998
PP No. 61 Tahun 1998
Garis-garis pangkal kepulauan di Laut Natuna ditarik dari titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau terluar

5 2011
Rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen tentang [illegible] untuk area sebelah [illegible] Sumatera disahkan pada tanggal 28 Maret 2011

SECARA GEOGRAFIS,

INDONESIA MEMILIKI KAWASAN DOMINAN PERAIRAN. LAUT TIDAK HANYA MENJADI SUMBER MAKANAN DAN REKREASI DALAM MAKNA LUAS NAMUN JUGA MENJADI “JALAN RAYA’ UNTUK PERDAGANGAN DAN KOMUNIKASI ANTAR BANGSA. (KONEKTIVITAS)

7 PILAR kebijakan kelautan



KONSEPSI RPJMN KEMARITIMAN 2020-2024

VISI	Terwujudnya Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju dan Kuat sebagai landasan menuju Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia				
MISI	1. Menegakkan kedaulatan Maritim	2. Memperkuat Ekonomi berbasis kemaritiman			3. Membangun Karakter bangsa Bahari
TUJUAN	Teguhnya jatidiri Indonesia sebagai Negara Kepulauan menjadi Negara Maritim yang maju, kuat, dan mandiri, yang berperan sebagai Pusat Peradaban Maritim Dunia				
STRATEGI	1. Meningkatkan Kedaulatan dan peran aktif Indonesia di bidang Kemaritiman pada tingkat regional & global	2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang seimbang antar kawasan & meningkatkan konektivitas maritim antar pulau, antar kawasan	3. Meningkatkan nilai tambah pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	4. Membangun Industri dan Jasa Maritim nasional yang maju, efisien, dan berdaya saing menuju industri maju 4.0	5. Membangun Budaya Bahari berdasarkan nilai-nilai nusantara
SASARAN	1. Tegaknya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dan berperan aktif di tingkat regional dan global.**(peningkatan Diplomasi maritim)**	2. Terwujudnya ekonomi maritim yang inklusif dan berdaya saing sebagai penggerak utama perekenomian **(Peningkatan Pertumbuhan PDB Maritim)**			3. Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang berbudaya nusantara. **(peningkatan Daya Saing)**
INDIKATOR & TARGET	1.% Inisiasi gagasan Indonesia yang diterima level internasional (85%) 2.% Penurunan pelanggaran kedaulatan maritime (60%) 3.% penurunan dan pengurangan dampak bencana dan kecelakaan di laut (≥60%)	4.. % Penurunan Disparitas Produktifitas Wilayah (0.25%) 5.% Biaya Logistik thd PDB (17%)	6. % Capaian pemanfaatan sumberdaya kelautan: 7. % Capaian pengelolaan lingkungan berkelanjutan	8. % Capaian Industri Kelautan: 9. % capaian Pengusahaan Sumberdaya Kelautan	10. Indeks inovasi (≥45) 11. Indeks Literasi
INISIATIF STRATEGIS	1. Penguatan Diplomasi Maritim 2. Peningkatan Pertahanan dan Keamanan Maritim 3. Peningkatan Keselamatan Maritim 4. Penguatan Hukum Maritim 5. Penanganan Batas Wilayah Maritim	1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi maritim 2. Pembangunan infrastruktur konektivitas maritim	1. pemanfaatan sumberdaya Perikanan 2. pemanfaatan sumberdaya ESDM 3. pemanfaatan SDPPK 4. pemanfaatan SDNK 5. pengelolaan lingkungan berkelanjutan 6. pengelolaan Konservasi Laut	1. Pengembagan Industri Maritim 2. Pengembangan Industri Bioteknologi 3. Pengembangan Jasa maritim 4. Pengembangan Pariwisata 5. Pengusahaan Perhubungan 6. Pengusahaan Bangunan laut 7. Pengusahaan Jasa Hankam, penegakan hukum dan keselamatan maritim	1. Peningkatan Edukasi Maritim 2. Peningkatan Inovasi 3. Peningkatan Literasi 4. Pengembangan Riset dan IPTEK Maritim

Assessment Esential (second edition),

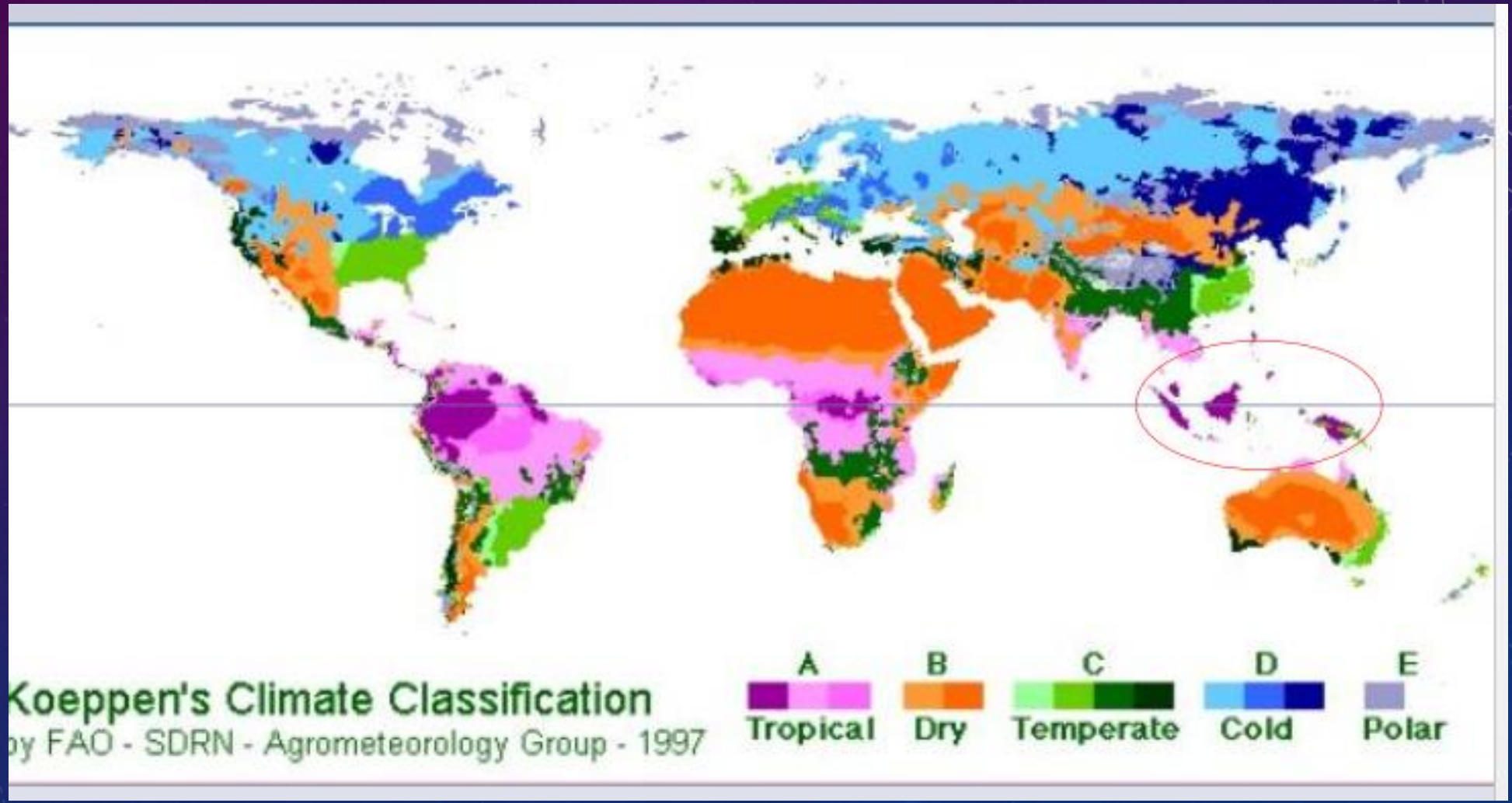
KEBIJAKAN REALISASI INDONESIA SBG NEGARA MARITIM

(PERT 3-5)

WIWIK SRI UTAMI

KEJAYAAN *SEA POWER* SUATU BANGSA BERKORELASI LANGSUNG DG KEJAYAAN BANGSA ITU SENDIRI

INDONESIA: NEGARA KEPULAUAN





FISIK-GEO

BUDAYA

POLITIK

SOSIAL-EKONOMI

HANKAM

Indonesia's Territorial Sea – The 1939 Ordinance

(Mengacu kepada pola pikir Pemerintahan Belanda)



(Deklarasi Djoeanda 1957, Upaya awal Pemerintahan Indonesia untuk menyatakan wilayah perairan Indonesia)

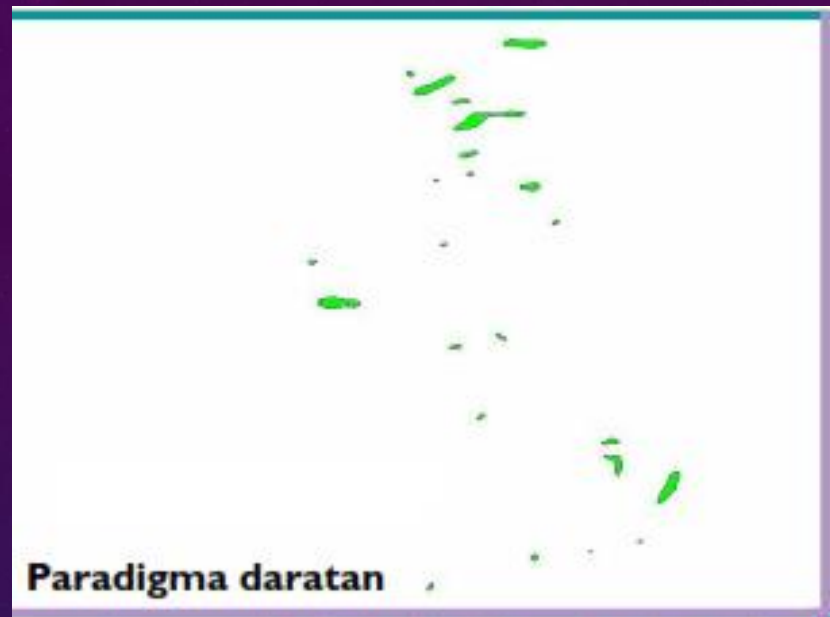


(Zona Maritim Indonesia, Hasil kesepakatan Internasional UNCLOS tahun 1982)

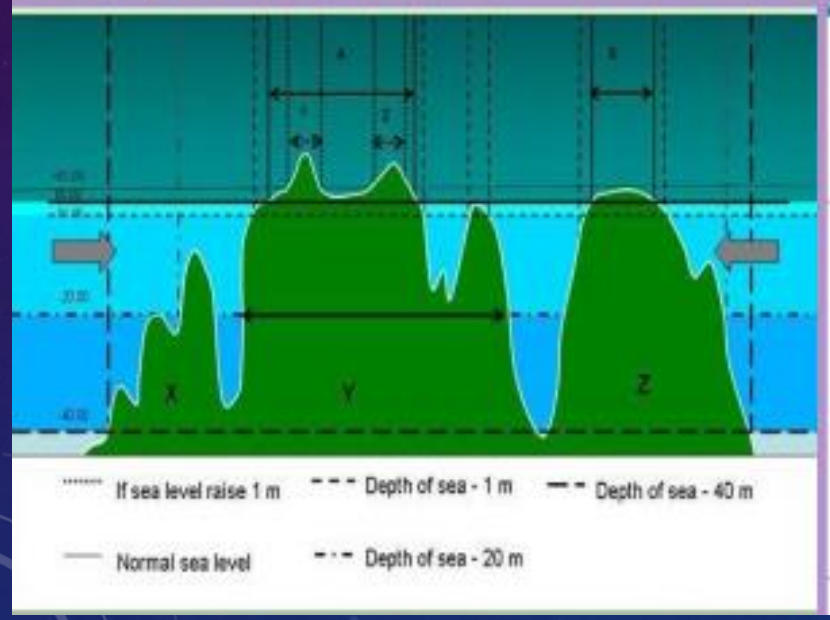


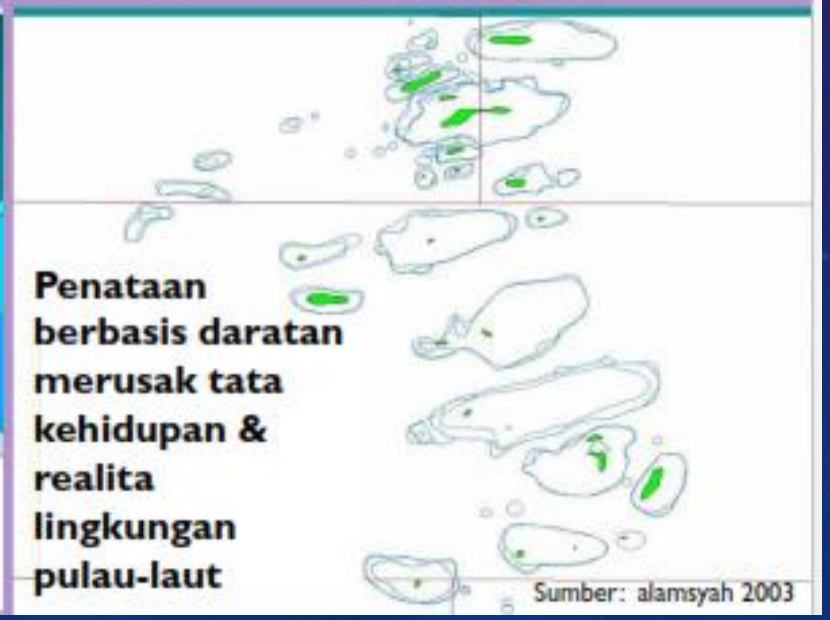
(Persyaratan menyediakan alur laut internasional tanpa mempermasalahkan di luar wilayah laut RI)







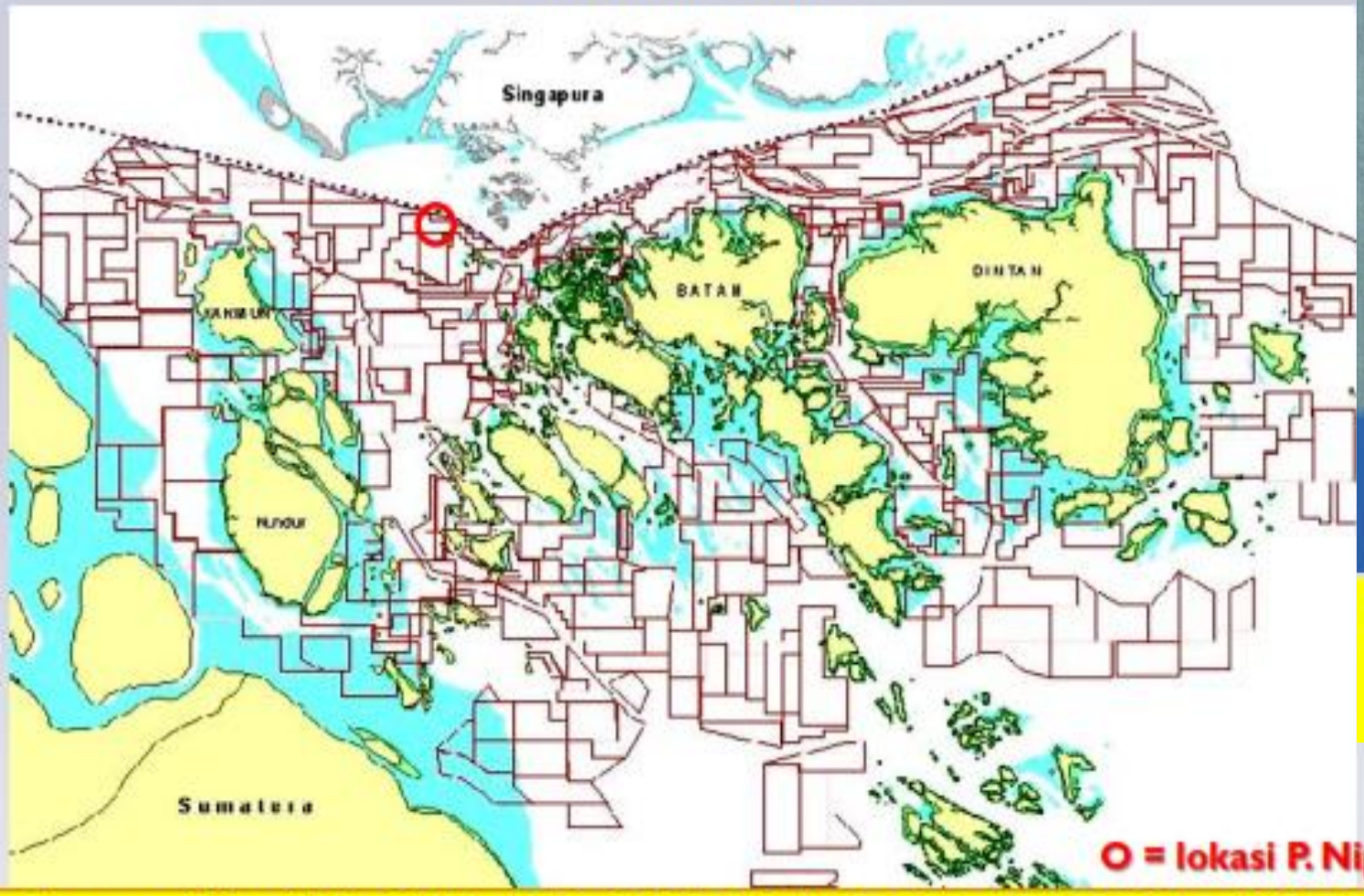




INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN dg PARADIGMA DATARAN

INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN dg PARADIGMA PULAU LAUT

Ketidak pedulian dan penghilangan hak atas laut dapat menimbulkan bencana. Perusakan bahkan penghilangan keberadaan pulau untuk kegiatan reklamasi dan peningkatan PAD melalui ekspor pasir yang tidak bertanggung jawab, sama dengan merongrong keberlanjutan tanah air Indonesia.

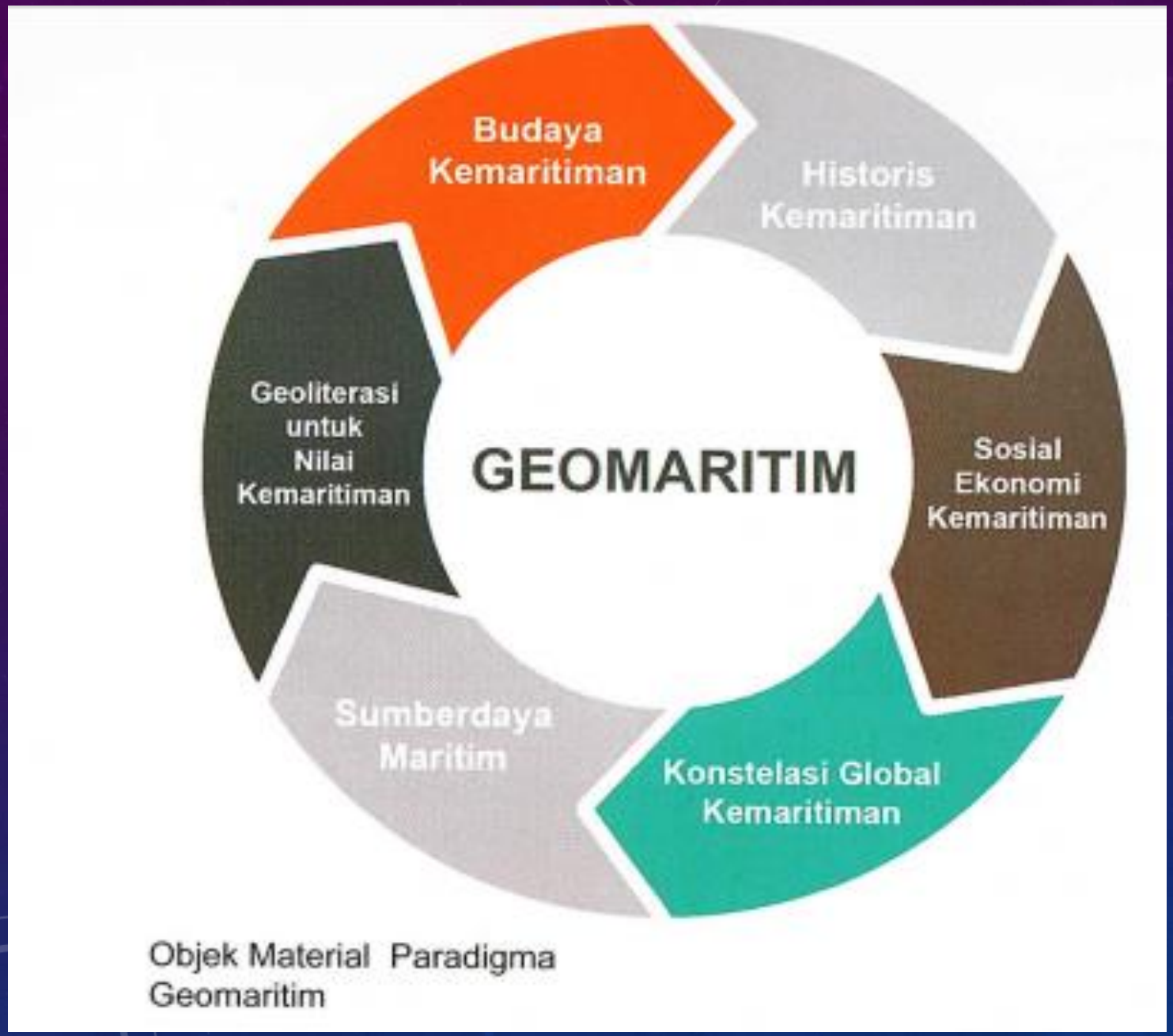




Bila Pulau Nipa hilang karena ketidakpedulian pembangunan di pulau kecil maka batas wilayah laut Indonesia akan mundur berikut luasan laut terdepan….

Luas Singapura: 1819 = 485 Km^2; 1965 = 527 Km^2; 1976= 581,5 Km^2 ; 2004 = 647 Km^2; 2005 = 699 Km^2 ; 2015


China's claimed territorial waters
UNCLOS 200 nautical mile, exclusive economic zone
Disputed islands
China
South China Sea
Hainan
Paracels
Thailand
Scarborough Shoals
Philippines
Cambodia
Vietnam
Spratlys
Brunei
Malaysia
Natuna
Malaysia
Singapore
Indonesia



Objek Material Paradigma Geomaritim

Kedepan perkembangan kemaritiman dunia akan mengarah kepada proses industrialisasi sumberdaya maritim, dan proses edukasi masyarakat agar sadar terhadap potensi maritim.

SEJARAH PERADABAN MARITIM

Sejarah mencatat bahwa kebesaran bangsa Indonesia dibangun karena kekuatan maritim.

Bukti kebesaran bangsa Indonesia sebagai Negara maritim diungkapkan ahli sejarah dari Universitas Indonesia, Ali Akbar. Menurutnya, sejarah kekuatan marirtim di tanah air sudah ada sejak zaman dulu.

Terdapat banyak bukti – bukti pra sejarah dimana bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat didunia maritim. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya lukisan perahu didalam gua di Sulawesi. Kehebatan pelaut – pelaut Indonesia di buktikan dengan adanya perubahan kebudayaan yang tadinya beriorentasi pada daratan kemudian memiliki kemampuan untuk berlayar.

JEJAK – JEJAK PERADABAN NUSANTARA

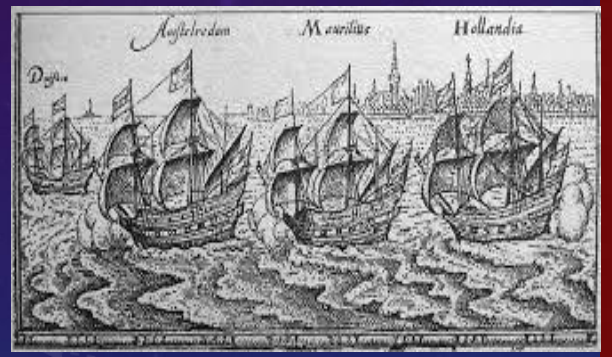
Bangsa Indonesia sudah di kenal dunia sebagai bangsa maritim yang maju. Bahkan bangsa ini pernah mengalami masa keemasan sejak awal masehi. Menggunakan kapal bercadik, mereka berlayar mengelilingi dunia dan menjadi bangsa yang di segani berbekalan alat navigasi seadanya bangsa Indonesia mampu berlayar ke utara, memotong lautan Hindia sampai Madagastar dan berlanjut ke timur hingga pulau Paska.

Seiring perjalanan waktu, mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang memiliki armada laut yang besar.

Bangsa Indonesia terlahir sebagai bangsa maritim, dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah dibeberapa belahan pulau. Penemuan situs prasejarah di gua- gua pulau muna, Seramdan Arguni yang dipenuhi lukisan perahu-perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah antara suku Aborigin di Ausrtralia dengan di Jawa. Ini menandakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki hubungan dengan bangsa lain.

Pada skitar awal abad pertama masehi di duga telah ada jaringan perdagangan antara nusantara dan India. Bukti-bukti tersebut berupa barang- barang Tembikar dari India (Arikamedu, Karaikadu dan Anuradha-Pura) yang ditemuakan di Jawa Barat (Patenggang) dan Bali (Sembiran). Keberadaan barang-barang tembikar tersebut diangkut menggunakan perahu atau kapal yang mampu mengarungi Samudra.

Bukti tertulis paling tua mengenai pemakaian perahu sebagai sarana transportasi laut tercatat dalam Prasasti Kedukan Bukit (16 Juni 682 masehi).



Bukti-bukti arkeologis transportasi laut banyak ditemukan di berbagai wilayah nusantara, berupa papan-papan kayu yang merupakan bagian dari sebuah perahu dan daun kemudi, yang ukurannya cukup besar.

Dari lahan rawa basah ini pada Agustus 1987 ditemukan sisa-sisa perahu kayu. Sisa perahu yang ditemukan terdiri darI Sembilan bilah papan dan sebuah kemudi. Dari Sembilan bilah papan tersebut, dua bilah di antaranya bersal dari sebuah perahu, dan tujuh bilah lainnya bersal dari perahu lain.



Pendekatan Geografi dalam Geomaritim

Ruang kajian geomaritim bukan

ARAH & KEBIJAKAN REALISASI MENJADI POROS MARITIM DUNIA



Arah dan Tujuan Kebijakan Realisasi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia


5 PILAR
POROS MARITIM
Indonesia menggelar KTT IORA di Jakarta pada 5-7 Maret 2017. IORA merupakan organisasi negara-negara kawasan pesisir Samudera Hindia. IORA memiliki anggota sebanyak 21 negara. KTT IORA menghasilkan dokumen yang dinamakan IORA Concord. KTT IORA memperkokoh Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Pengelolaan Sumber Daya Laut
Manajemen Perikanan
Perkuat Sains dan Iptek
Pertahanan Maritim
Keselamatan & Keamanan Maritim
Manajemen Resiko Bencana
Diplomasi Maritim
Peningkatan KS negara dan organisasi mitra
Konektivitas dan Infrastruktur
Konektifitas, kerja sama pelabuhan dan UKM
Pariwisata & pertukaran kebudayaan
Budaya Maritim
Promosi industri perikanan yang berkelanjutan
Kerja sama blue economi, kesetaraan gender
Sumber : IORA 2017
Grafis : Mohammad Rizal
METROTV NEWS.COM


Seri RPJMN
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN INDONESIA 2015-2019
Terwujudnya Indonesia Sebagai Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional
1 Memperkuat Jatidiri Negara Maritim
Penyelesaian pencatatan
4000
pulau-pulau kecil ke PBB
Penyelesaian batas maritim dengan 9 negara tetangga
2 Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar
Peningkatan ketaatan pelaku perikanan liar
52%
2014
87%
2019
3 Membangun Konektivitas Nasional
24
Pelabuhan penunjang tol laut
60
Tambahan pelabuhan penyeberangan
54
Tambahan kapal perintis
4 Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
3
Tambahan pelabuhan perikanan
Sumber : RPJMN 2015-2019



- Pembangunan 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu dengan penyimpanan dan pengolahan produk perikanan terpadu.
- Pemberantasan illegal, unregulated, dan unreported fishing.
- Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan overfishing, dan meningkatkan intensitas penangkapan di kawasan underfishing sesuai batas kelestarian.
- Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan.
- Peningkatan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan, dalam lima tahun akan menjadi 17 juta hektar dan penambahan konservasi seluas 700 hektar.
- Penerapan best aqua-culture practice untuk komoditas-komoditas unggulan.
- Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yang mendukung kinerja pembangunann maritim dan perikanan.
- Meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat menjadi 40-50 juta ton per tahun pada tahun 2019.

STRATEGI KEBIJAKAN GEOMARITIM

ASTHA TARANI

- BENTUK & LETAK STRATEGIS WILAYAH INDONESIA
- KEBIJAKAN TATA RUANG LAUT NASIONAL UNTUK MENGELOLA SUMBERDAYA
- EKSPANSI RENCANA RUANG POROS MARITIM DUNIA
- PRIORITAS PEMBANGUNAN INSFRASTRUKTUR PELABUHAN
- KONEKTIVITAS PELABUHAN DENGAN WILAYAH PRODUKSI DARAT & LAUT (SISTEM CORE-HINTERLAND)
- MENYUSUN MATERI DIPLOMASI LUAR NEGERI MELALUI KEBUDAYAAN MARITIM
- EDUKASI MELALUI GEOLITERASI NILAI KEMARITIMAN
- TEKNOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL

1. BENTUK & WILAYAH INDONESIA

Bentuk Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan ukuran besaran yang berbeda membuat wilayah Indonesia bukan merupakan daratan yang tertutup (landlock) tetapi merupakan wilayah yang terbuka,

Kebhinekaan wilayah geografi mengandung arti saling ketergantungan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya dengan syarat adanya cluster-kluster wilayah tertentu agar mobilitas tidak menghabiskan terlalu banyak energi.

Wilayah geografi mempunyai karakteristik yang dipengaruhi oleh unsur-unsur geosfer

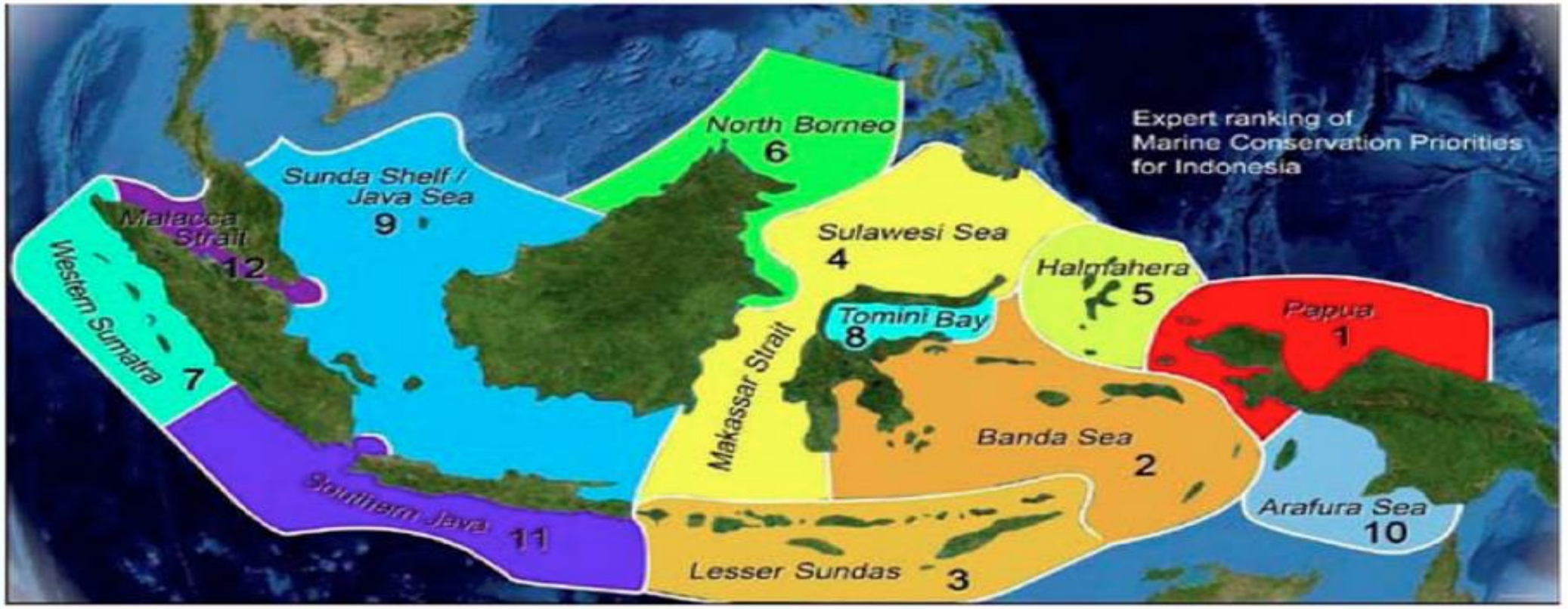
Masing-masing wilayah mempunyai *geographic competitiveness yang bersifat khas*

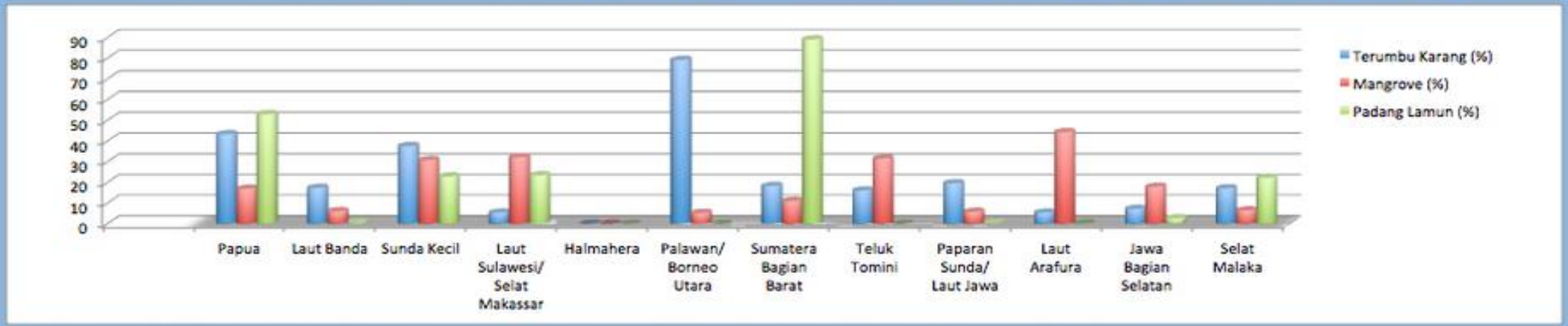
2. KEBIJAKAN TATA RUANG LAUT NASIONAL

Tata ruang nasional sebagai landasan legal untuk dijadikan “ATURAN MAIN” dalam memanfaatkan ruang wilayah laut Indonesia.

Aturan masing-masing sector agar dapat memanfaatkan wilayah laut dengan tepat

Menjaga keberlanjutan sumberdaya perairan laut



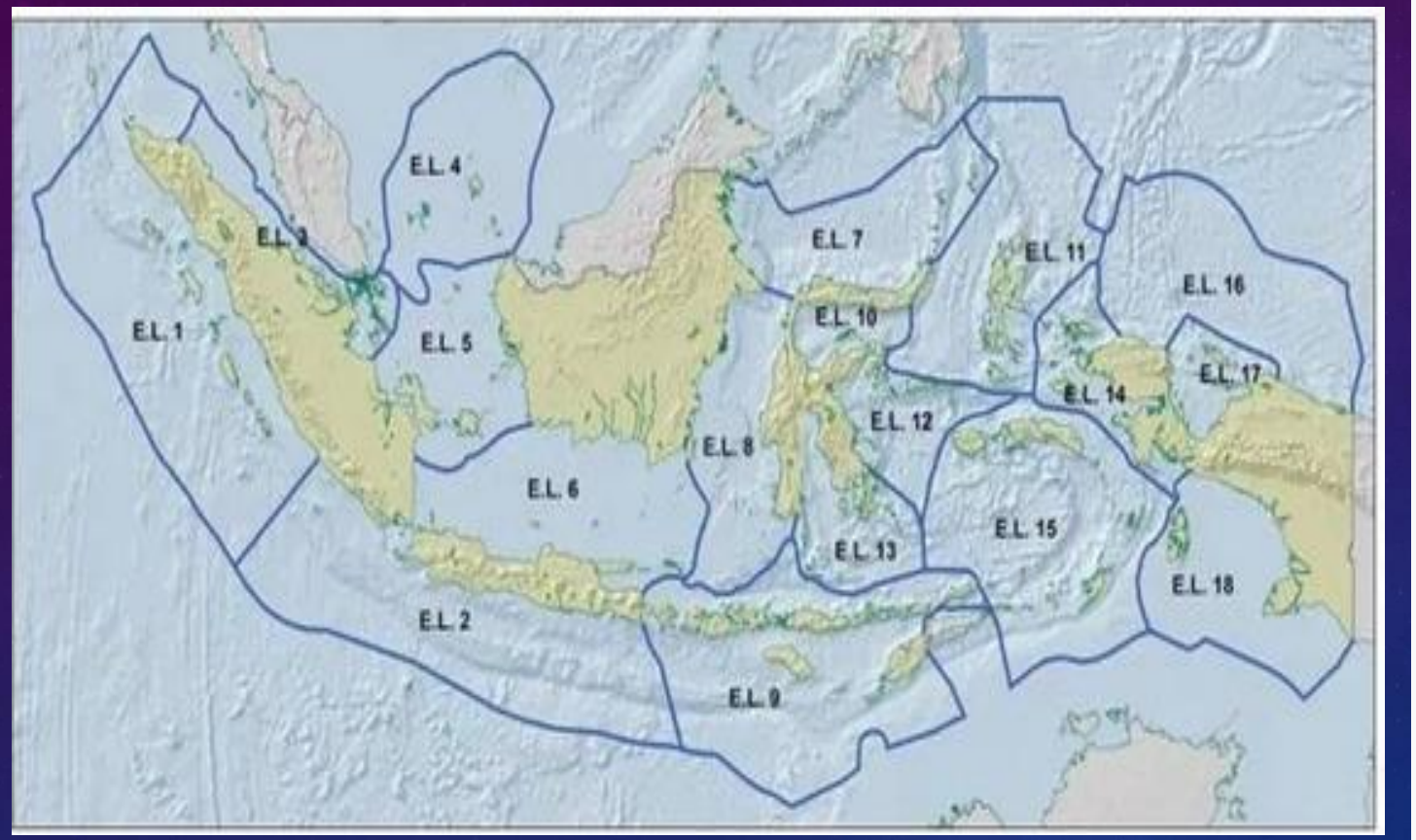


Sumber: Kemenhut dan KKP, 2010, Profil 76 Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2013. Grafis: Mongabay-Indonesia

PETA EKO-REGION INDONESIA

Di Indonesia, kawasan konservasi perairan terbagi menjadi tiga basis, yaitu spasial, konservasi habitat, dan konservasi spesies. Nah, salah satu contoh konservasi secara spasial adalah Ekoregion Laut Indonesia (ELI). Lantas, apa itu ELI? ELI merupakan perwilayahan laut Indonesia yang ditetapkan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Jadi, ekoregion ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian produktivitas sumber daya laut secara berkelanjutan. Parameter yang digunakan meliputi morfologi dasar laut, oseanografi, dan keanekaragaman hayati.

PETA EKOREGION INDONESIA



EL 1	Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera
EL 2	Samudera Hindia Sebelah Selatan Jawa
EL 3	Selat Malaka
EL 4	Laut Natuna
EL 5	Selat Karimata
EL 6	Laut Jawa
EL 7	Laut Sulawesi
EL 8	Selat Makassar
EL 9	Perairan Bali dan Nusa Tenggara
EL 10	Teluk Tomini
EL 11	Laut Almahera
EL 12	Laut Banda Sebelah Timur Sulawesi
EL 13	Laut Banda Sebelah Selatan Sulawesi
EL 14	Laut Seram dan Teluk Bintuni
EL 15	Laut Banda
EL 16	Samudera Pasifik Sebelah Utara Papua
EL 17	Teluk Cenderawasih
EL 18	Laut Arafura

3. EKSPANSI RENCANA TATA RUANG POROS MARITIM DUNIA DALAM SKALA KAWASAN ANTAR NEGARA

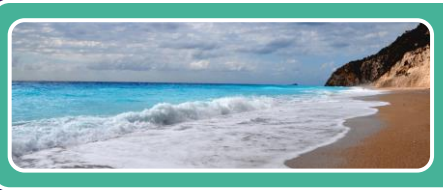
- HARUS MENEKANKAN KONTEKS GEOEKONOMI & GEOPOLITIK
- MEMANFAATKAN POSISI STRATEGIS INDONESIA
- DI SEPANJANG PANTAI TIMUR DAN UTARA SUMATERA PERLU DIBANGUN PELABUHAN (BELAWAN & SABANG) YG MENDUKUNG PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI SELAT MALAKA
- DI BAGIAN TIMUR INDONESIA PERLU DIKEMBANGKAN RUANG GERAK UNTUK MENAMPUNG & MENDISTRIBUSIKAN KOMODITAS PERDAGANGAN MENUJU NEGARA YANG BERADA DI ASIA PASIFIK
- PANDANGAN GEOMARITIM DLM KONTEKS EKSPANSI RUANG POROS MARITIM DUNIA DI SKALA INTERNASIONAL, INDONESIA PERLU MEMERLUKAN EKSPANSI RUANG LAUT KE SISI BARAT (SAMODERA Hindia) SERTA MENGARAH KE UTARA &SELATAN (KAWASAN PASIFIK &AUSTRALIA)


U
Jalur Pelayaran
Jalur Utama
Jalur
Tol Laut
Ekspansi ruang Poros Maritim Dunia

4. PRIORITASKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN (TARAF INTERNASIONAL)



PELABUHAN KLASTER BARAT (AKSES HINDIA)



PELABUHAN KLASTER TIMUR-UTARA (AKSES PASIFIK)



PELABUHAN KLASTER AUSINDO (ASES AUSTRALIA & SELANDIA BARU)



MENINGKATKAN MODA TRANSPORTASI PENGIRIMAN BARANG

5. KONEKTIVITAS DENGAN PELABUHAN DENGAN WILAYAH PRODUKSI DI DARAT & LAUT

- PELABUHAN SUDAH DIBANGUN TP MASIH MINIM BARANG HASIL PRODUKSI YANG DIANGKUT
- PELABUHAN JUSTRU SEMAKIN MENINGKAT MELAYANI BARANG IMPOR LUAR NEGERI
- HARUS MENERAPKAN SISTEM CORE-HINTERLAND
- PENINGKATAN HASIL PRODUKSI DI DAERAH HINTERLAND PELABUHAN BAIK YANG ADA DI DARAT MAUPUN DI LAUT.

INDONESIA BISA MENGULANG KEJAYAAN MASA LALU SEBAGAI PEMASUK REMPAH-REMPAH TERBESAR DUNIA

6. MENYUSUN MATERI DIPLOMASI LUAR NEGERI MELALUI KEBUDAYAAN MARITIM INDONESIA

KEKUATAN SUMBERDAYA LOKAL HRS DIOPTIMALKAN

MODAL SOSIAL MASYARAKAT MARITIM SPT YANG DILAKUKAN SUKU BUGIS YANG MENJALIN HUB DG FILIPINA UNTUK AKTIVITAS KEMARITIMAN, SUKU BAJO MEMILIKI KEKUATAN DAN PENGALAMAN MENJELAJAH LAUTAN SECARA LUAS

DIPLOMASI YG DIKEMBANGKAN ADALAH AFILIASI KEKUATAN ANTARA NEGARA DENGAN SASARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

TERDAPAT BAHAN YANG TELAH DIMILIKI OLEH SUKU MARITIM INDONESIA TERKAIT DENGAN ILMU DAN TEKNOLOGI LOKAL, YAITU:

- DAUR/SIKLUS PENANGKAPAN IKAN (ALUR RUAYA IKAN)
- TEKNOLOGI KAPAL MASYARAKAT

DILPOMASI



Persoalan Natuna



Kepulauan Natuna, di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, berisi **154 pulau**, adalah bagian terdepan Indonesia di utara.



Kekayaan Natuna

Luas Kabupaten Natuna 264.198,37 km² — daratan 2.001,30 km², lautan 262.197,07 km². Ibu kota di Ranai, Pulau Bunguran.



Ada bermacam ikan, udang, kepiting, hingga lobster. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2017), potensi produksi biota laut 7603 ribu ton.



Ladang gas Natuna Timur seluas 310 km², di kedalaman 145 m di bawah laut, diperkirakan mengandung 6.300 miliar m³ gas alam.



Setidaknya ada tujuh wilayah wisata bahari, termasuk Embung Serbaguna Sedanau di Pulau Bunguran, bisa dicapai dengan feri dari Pelabuhan Binjai.

Kepentingan Tiongkok

Kepulauan Natuna berbatasan dengan Laut Cina Selatan, perairan yang tepiannya dipagari oleh Tiongkok, Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Vietnam.





Tiongkok ingin wilayahnya lebih luas dari sekarang dengan klaim berdasarkan masa lalu ketika negara-negara lain yang modern belum ada.



Salah satu klaim sejarah: sudah sejak dulu nelayan Tiongkok mencari ikan di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara. Tapi UNCLOS tak mengakui.

Akankah berperang?

ZEE bukan di laut teritorial Indonesia, melainkan laut lepas.

Indonesia punya **hak berdaulat** (*sovereign right*) atas sumber daya alam ZEE di wilayahnya, tapi **bukan kedaulatan penegakan hukum**.

Maka Indonesia tak dapat menindak kapal penjaga pantai Tiongkok di Natuna. **Pihak yang pertama menembak** adalah



salah menurut hukum internasional.

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana kepada CNN Indonesia (7/1/2020)

lokadata

7. EDUKASI MASYARAKAT MELALUI GEOLITERASI NILAI KEMARITIMAN UNT PENGEMBANGAN SDM INDONESIA

CARA EFEKTIF MELALUI PENDIDIKAN FORMAL

PROSES EDUKASI NILAI MARITIM PALING EFEKTIF PADA USIA 16-19 TAHUN, TP PENGENALAN MARITIM SEBAIKNYA SDH DILAKUKAN SEJAK DINI

STRATEGI YANG DIGUNAKAN:

- MENYESUAIKAN KURIKULUM SEKOLAH
- MENINGKATKAN JUMLAH ALAT PERAGA
- MENINGKATKAN MAGANG BAGI SEKOLAH YANG BERKAITAN DG KEMARITIMAN
- MENINGKATKAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA PENDIDIKAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG KEMARITIMAN

8. MEMILIKI, MENGAPLIKASIKAN TEKNOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL SEBAGAI DATA DASAR KEBIJAKAN ATAU DATA DASAR POKOK PEMBANGUNAN MARITIM

INDONESIA OCEAN DATA CENTRE MERUPAKAN SALAH SATU SOLUSI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KETIDAK SERAGAMAN DAN KETIDAK LENGKAPAN DATA ATAU PETA RUJUKAN DALAM PEMBUATAN TATA RUANG LAUT NASIONAL

TUGAS: LKM-2

MENGANALISIS KAITAN ANTARA ASTHA TARANI GEO MARITIM DENGAN LIMA PILAR POROS MARITIM

TANTANGAN PEMBANGUNAN LAUT INDONESIA

PERTEMUAN 7-8

WIWIK SRI UTAMI

TANTANGAN DI BIDANG IPOLEKSOSBUD HANKAM




PETA JALAN
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
MENUJU
POROS MARITIM DUNIA
7 PILAR KEBIJAKAN
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut
Tata Kelola dan kelembagaan di Laut
Ekonomi, Infrastruktur, dan Peningkatan Kesejahteraan
Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut
Budaya Bahari
Diplomasi Maritim
PILAR KEBIJAKAN
UU NO.17/2007 TENTANG RPJP
76 KEBIJAKAN UTAMA
Pilar Kebijakan Pertama:
21 Strategi utama yakni:
* 9 Strategi Pengembangan SD Kelautan
* 12 Strategi Pengembangan SD Manusia
Pilar Kebijakan Kedua:
8 Strategi utama
Pilar Kebijakan Ketiga:
3 Strategi utama
Pilar Kebijakan Keempat:
20 Strategi utama yakni:
* 8 Strategi Ekonomi kelautan
* 7 Strategi Infrastruktur Kelautan
* 5 Strategi peningkatan kesejahteraan
Pilar Kebijakan Kelima:
12 Strategi utama yakni:
* 6 Strategi Pengelolaan Ruang Laut
* 6 Strategi Pelindungan Lingkungan Laut
Pilar Kebijakan Keenam:


UU NO.32/2014 TENTANG KELAUTAN
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
STRATEGI/ KEBIJAKAN UTAMA
POROS MARITIM DUNIA
NAWA CITA
PRINSIP KEBIJAKAN
Visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional
Wawasan Nusantara
Pembangunan berkelanjutan
Ekonomi Biru
Pengelolaan terintegrasi dan transparan
Partisipasi
Pemerataan dan kesetaraan

Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

HISTORIS



Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan telah menambah nilai strategis aspek geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat internasional harus berlayar melalui wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia untuk keperluan navigasi, komunikasi, penanaman dan peletakan kabel serat optik, pipa gas, perdagangan berbagai barang komoditas, manufaktur, serta ekspor energi dan jasa.

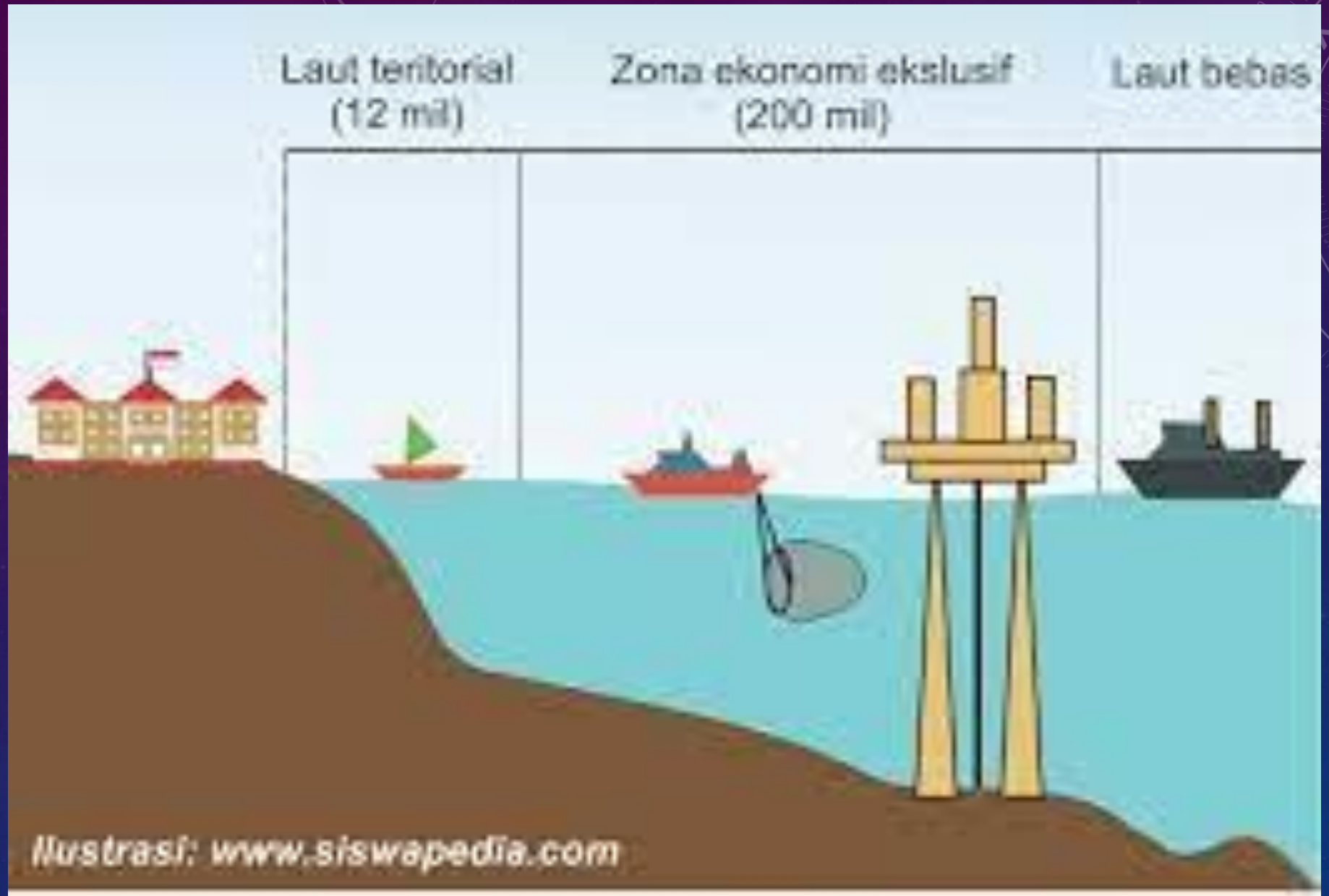
Posisi strategis Indonesia tidak hanya dilihat dari posisi di persilangan antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, tetapi juga di antara Laut China Selatan dan Laut Asia Timur dengan Samudera Hindia, antara individualisme liberal di selatan dengan komunisme di utara, antara penghasil komoditas di selatan dengan pengguna komoditas di utara, antara penghasil energi di selatan dengan pengguna energi di utara, antara middle power di selatan dengan global power di utara, antara non-nuclear powerdi selatan dengan nuclear power di utara, dan antara anggota tetap Dewan Keamanan PBB di utara dengan bukan anggota Dewan Keamanan PBB di selatan. Indonesia kini berada dalam lingkaran perebutan pengaruh antara kekuatan dominan pasca-Perang Dunia II dengan kekuatan lama yang bangkit kembali.



Posisi strategis Indonesia, beserta faktor geografis dan kondisi sosial ekonominya, juga menempatkan Indonesia dalam posisi penting di lingkungan global, yaitu dalam mempengaruhi kestabilan politik, ekonomi, serta keamanan lingkungan regional dan internasional.

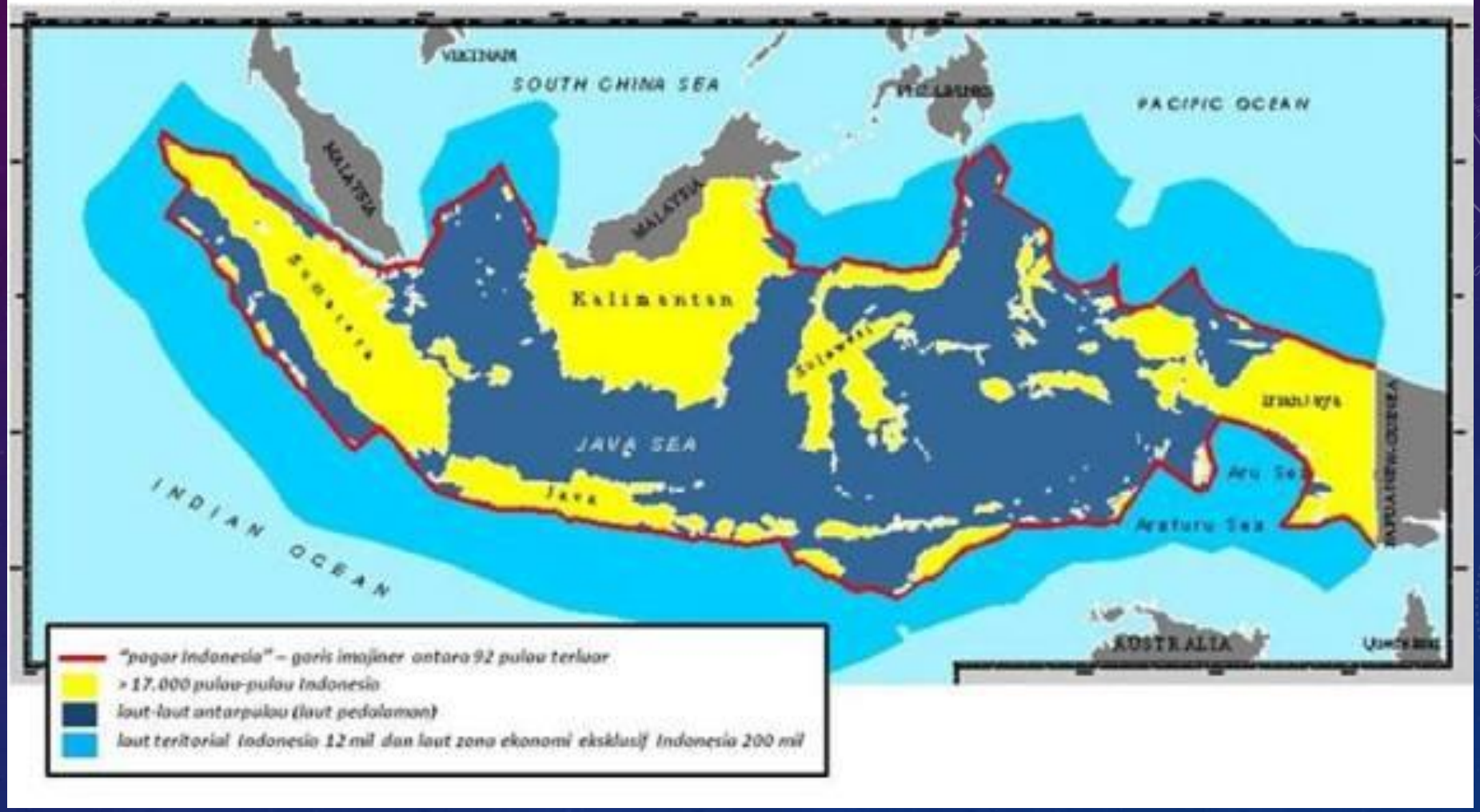

PERBATASAN LAUT INDONESIA DGN 10 NEGARA TETANGGA
90° T
100° T
110° T
120° T
130° T
140° T
10°U
0°
10°S
VIETNAM
AILAND
LAYSIA
MALAYSIA
FILIPINA
PALAU
AMUDERA PASIFIK
SUMATERA
KALIMANTAN
SULAWESI
JAWA
LAUT JAWA
ALKI I
ALKI II
ALKI III
SAMUDERA HINDIA
LAUT ARU
PNG
RDTL
AUSTRALIA
N
0
500
nautical miles
LEGENDA :
Perairan Kepulauan dan Pedalaman
Laut Wilayah (12 Nm)
Zona Tambahan (24 Nm)
ZEE (200 Nm)
Batas Landas Kontinen
ALKI
Dibuat Oleh : Dinas Hidro-Oseanografi Angkatan Laut - 2011

Berbagai zona maritim Indonesia ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional. Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen Indonesia, jika tidak berbatasan dengan negara tetangga, Indonesia menetapkannya secara unilateral. Dalam hal berbatasan dengan negara tetangga, akan ditetapkan sesuai dengan prinsip hukum laut internasional. Sementara itu, untuk segmen-segmen batas yang belum selesai dirundingkan penetapannya dengan negara tetangga, batasnya digambarkan sesuai dengan klaim maksimal kepentingan Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum laut, antara lain yang terkait dengan penetapan garis pangkal.



Gambar. Pembagian wilayah menurut konvensi hukum laut PBB

Wilayah Kedaulatan Indonesia

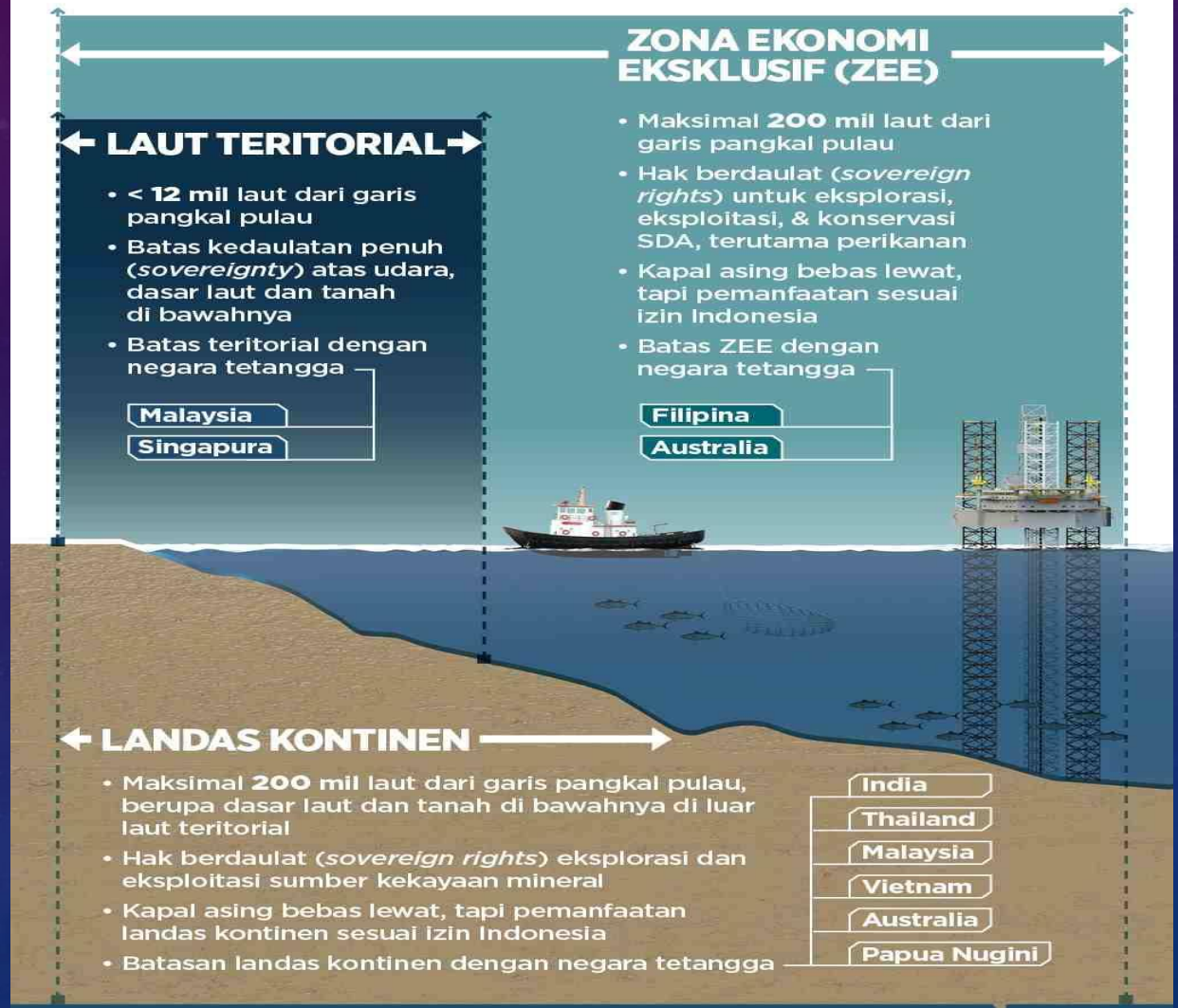


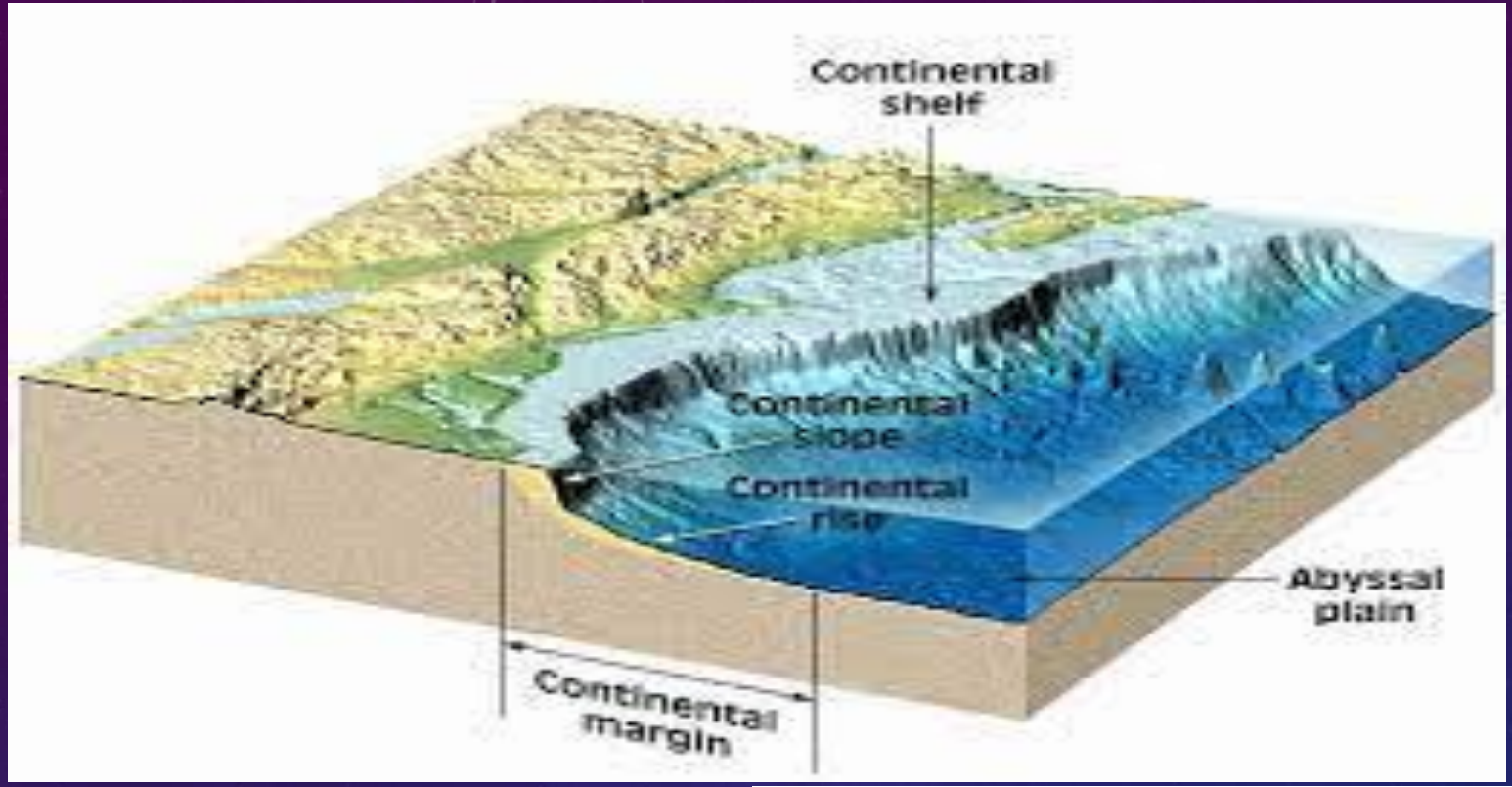
katadata.co.id
Ekonografik

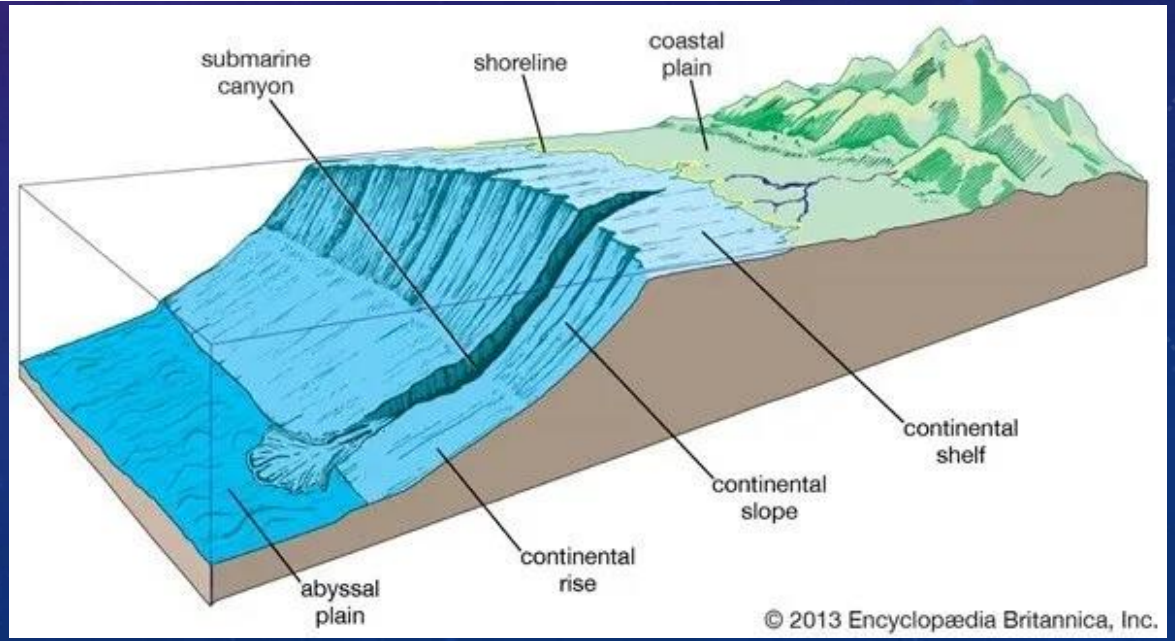
3 BATAS LAUT INDONESIA

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki perbatasan laut dengan negara tetangga. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, ada tiga kategori batas laut.

SUMBER:
UNCLOS 1982, TRI PATMASARI DKK (2016), BBC INDONESIA
PENULIS:
ANDREA LIDWINA
DESAIN:
DANI NURBIANTORO
VISUAL:
TIMOTHY ADRY EMANUEL




Continental shelf
Continental slope
Continental rise
Abyssal plain
Continental margin


submarine canyon
shoreline
coastal plain
continental shelf
continental slope
continental rise
abyssal plain
© 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

TANTANGAN: KONDISI GEOGRAFIS-DEMOGRAFIS...INDONESIA

- Meneguhkan identitas atau jati diri bangsa yang menyatakan bertanah air satu, Indonesia. Tidak mudah menyatakan kepada masyarakat.
- Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat terbuka dan posisi geostrategis yang memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan lima wilayah choke points (Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombai-Wetar) membuat Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk ancaman,
- Peningkatan pengawasan dan tantangan pengamanan di pulau-pulau kecil terdepan dan terisolasi, terutama pulau-pulau yang bertetangga dengan daerah konflik di luar wilayah Indonesia.
- Membangun infrastruktur dan konektivitas antarwilayah melalui optimalisasi perhubungan laut untuk menghilangkan kesenjangan.

TANTANGAN: KONDISI GEOGRAFIS-DEMOGRAFIS…INDONESIA

- Rentang wilayah yang sangat luas juga menuntut Indonesia untuk menyelesaikan batas maritim laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen guna mendapatkan kepastian hukum wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia,
- Pengembangan wilayah dan peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan tata ruang laut yang komprehensif.
- Sumber daya alam hayati di laut Indonesia seperti perikanan perlu dijaga dengan baik dari praktik-praktik perikanan yang tidak lestari
- Pemanfaatan minyak, gas, mineral, arus, dan ombak untuk keperluan energi dan mineral masa depan.
- Indonesia juga menghadapi tantangan untuk menambah luas yurisdiksi landas kontinen di luar 200 mil laut dan mampu melakukan eksplorasi di wilayah “The Area” yang berada di luar perairan internasional.

TANTANGAN: KONDISI GEOGRAFIS-DEMOGRAFIS...INDONESIA

- Pengembangan jasa logistik pelabuhan, galangan kapal, dan wisata bahari.
- Kegiatan jasa kemaritiman dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan nonhayati secara langsung dalam jangka pendek dan jangka panjang dapat membawa dampak pencemaran lingkungan hidup dan perusakan keanekaragaman hayati.
- Gerakan desentralisasi kelautan
- Perkembangan lingkungan strategis Indonesia mengalami perubahan pesat
- Kemampuan nasional dalam pendidikan maritim, serta penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, dimulai dari penyiapan SDM melalui pendidikan menengah dan tinggi yang diwujudkan dengan pemberian beasiswa sekolah teknis maritim sampai dengan peningkatan kapasitas riset dan pengembangan.


SEMOGA SEHAT, SUKSES SELALU.